

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat praktik *Good Public Governance* (*GPG*) yang telah dilaksanakan perguruan tinggi di Jawa Tengah. Melibatkan 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tiga lembaga pemerintah di Jawa Tengah, serta satu pimpinan wilayah muhammadiyah. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei hingga Juli 2024, lokasi ini dipilih karena pada tahun 2020, perguruan tinggi di Jawa Tengah belum sepenuhnya menerapkan *good governance*. Namun, pada tahun 2023, perguruan tinggi di Jawa Tengah ditetapkan sebagai *role model good governance* untuk setiap daerah di Indonesia oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sebelum mendistribusikan kuesioner yang sama kepada mahasiswa, lembaga pemerintah, serta pimpinan wilayah muhamadiyah di Jawa Tengah, yang semuanya bertindak sebagai *stakeholder* dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian informasi *online* menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan kriteria sampel. Kriteria ini mencakup lembaga yang menyediakan informasi publik, memiliki badan pengawas internal, serta rutin melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti berhasil mengidentifikasi 15 perguruan tinggi di Jawa Tengah yang memenuhi kriteria, serta tiga lembaga pemerintahan, dan satu pimpinan wilayah muhammadiyah.

3.2 Desain Penelitian

Menurut Agustina (2013), “Desain penelitian merupakan rencana kerja yang terstruktur untuk menguji hubungan antar variabel, termasuk perencanaan atas pengumpulan, pengukuran, dan analisis data” (p. 31). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis (*hypothesis testing*) yang menjelaskan hubungan dan sifat tertentu, khususnya pengaruh pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana dikaitkan dengan *Good Public Governance (GPG)* perguruan tinggi di Jawa Tengah. Sebab pelayanan akademik akan mencetak lulusan yang kompeten, beretika, dan siap bersaing di pasar global. Kepatuhan regulasi akan memastikan penerapan hukum dan kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta alokasi dana akan menghindari penggunaan sumber daya publik yang tidak optimal, sesuai dengan tujuan strategis perguruan tinggi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan melibatkan penyebaran kuesioner ke 15 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, tiga lembaga pemerintah, yaitu LLDIKTI VI yang merupakan transformasi dari Koordinasi Perguruan Tinggi (Kopertis) dan perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (LLDIKTI VI, 2020), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jawa Tengah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah, serta satu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Menurut Sugiyono (2013), “Metode kuantitatif merupakan metode yang meliputi eksperimen dan survei yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, diantaranya empiris, objektif, terukur, rasional dan

sistematis (p. 7). Penelitian ini menggunakan data primer, menurut Sugiyono (2013), data primer merupakan suatu data penelitian yang bersumber pada responden langsung. Peneliti bermaksud untuk memberikan analisis dan informasi mengenai objek penelitian dengan mengumpulkan data dari sampel yang diharapkan dapat mewakili populasi. Data yang diperoleh akan diolah dan disajikan dalam bentuk persentase, grafik, dan tabel. Selanjutnya, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian dan memberikan saran yang relevan untuk pengembangan lebih lanjut.

3.3 Populasi dan Sampel

Penelitian kuantitatif menekankan pada keluasan informasi, melibatkan populasi yang luas dengan variabel terbatas. Sugiyono (2013) mendefinisikan populasi sebagai “Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek /subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (p. 215). Populasi dalam penelitian ini mencakup peringkat top 40 perguruan tinggi di Jawa Tengah menurut 2024 *university ranking*. Perguruan tinggi ini dipilih karena telah mengelola operasional dan keuangannya dengan baik serta mendapatkan kepercayaan *stakeholder*, diantaranya:

1. Memiliki piagam, lisensi, atau akreditasi terkait.
2. Menawarkan tiga tahun sarjana, magister, dan doktoral.
3. Kursus utama dalam pendidikan konvensional bukan tatap muka.

Selain itu, untuk menyesuaikan dengan konsep *Good Public Governance* (GPG), dilakukan penyesuaian dengan menambahkan tiga lembaga pemerintah

dan satu pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jawa Tengah sebagai bagian dari populasi penelitian. Keempatnya merupakan *stakeholder* yang terlibat dan merasakan dampak dari kinerja manajemen perguruan tinggi terhadap tata kelola publik yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai dari perspektif internal perguruan tinggi tetapi juga melibatkan eksternal. Oleh karena itu, jumlah populasi penelitian ini menjadi 44 lembaga.

Sampel dalam penelitian kuantitatif harus representatif (mewakili) terhadap populasi. Sugiyono (2013) menjelaskan, “Sampel mempunyai karakteristik yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian yang dapat mewakili seluruh sampel yang ditentukan oleh peneliti” (p. 118). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria pertimbangan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini meliputi:

a) Lembaga Yang Menyediakan Informasi Publik

Informasi publik yang dapat diakses melalui *website* resmi lembaga, hal ini tercantum dalam:

1. UU RI No. 12 Tahun 2012 Pasal 63 huruf b “Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (p. 45).
2. UU RI No. 14 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna.” (p. 4).

b) Lembaga Yang Memiliki Badan Pengawas Internal

Badan pengawas internal yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan berbagai pihak dalam pengawasannya, hal ini tercantum dalam:

1. Permendikbud No. 139 Tahun 2014 Bab II bagian Statuta “Tugas, fungsi dan wewenang badan pengawas dengan penetapan kebijakan program pengawasan non-akademik, pengawasan internal, penyusunan laporan hasil pengawasan internal, dan pemberian saran atau pertimbangan dari pengelolaan” (p. 11).
2. PP RI No. 60 Tahun 2008 Pasal 4 “Pimpinan lembaga wajib menciptakan pengawasan internal dalam menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam lingkungan kerjanya.” (p. 4)

c) Lembaga Yang Melakukan Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh auditor eksternal, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan (LPPK), serta lembaga pemeriksaan lainnya untuk memastikan lembaga memberikan data dan informasi seadanya, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 pasal 68 huruf b “Pendidikan tinggi yang mengutamakan moral akademik untuk senantiasa mengemukakan data dan informasi sebagaimana adanya” (p. 88).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti telah menetapkan beberapa sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini, seperti tercermin dalam tabel 3.1 mengenai kriteria sampel penelitian.

Tabel 3.1
Kriteria Sampel Penelitian

No	Perguruan Tinggi	Ketersediaan		
		Informasi Publik	Badan Pengawas Internal	Pemeriksaan Laporan Keuangan
1	Universitas Diponegoro	V	V	V
2	Universitas Sebelas Maret	V	V	V
3	Universitas Negeri Semarang	V	V	V
4	Universitas Jenderal Soedirman	V	V	V
5	Universitas Sains & Teknologi Komputer	V	V	V
6	Universitas Muhammadiyah Surakarta	V	V	V
7	Universitas Katolik Soegijapratama	V	V	X
8	Universitas Dian Nusantara	X	V	X
9	Universitas Kristen Satya Wacana	V	X	X
10	Universitas Islam Sultan Agung	V	V	V
11	Universitas Islam Negeri Walisongo	V	V	V
12	Universitas Muhammadiyah Semarang	V	V	V
13	Universitas Stikubank	V	X	X
14	Universitas Muhammadiyah Purworejo	V	V	V
15	Universitas PGRI Semarang	V	V	V
16	Universitas Tidar	V	V	V
17	Institute Seni Indonesia Surakarta	V	V	V
18	Universitas Muria Kudus	V	V	X
19	Universitas Islam Negeri Salatiga	V	V	V
20	Universitas Muhammadiyah Magelang	V	V	V
21	Universitas 17 Agustus Semarang	X	V	X
22	Universitas Pekalongan	V	V	x
23	Universitas Slamet Riyadi	V	X	X
24	Universitas Pascasakti Tegal	V	X	X
25	Universitas Saints Al-Qur'an	V	V	X
26	Universitas Duta Bangsa Surakarta	V	X	V
27	Universitas Veteran bangun Nusantara	V	X	X

No	Perguruan Tinggi	Ketersediaan		
		Informasi Publik	Badan Pengawas Internal	Pemeriksaan Laporan Keuangan
28	Universitas Aisyiyah Surakarta	V	X	V
29	Universitas Wijaya Kusuma	V	V	X
30	Universitas Ngudi Waluyo	V	X	X
31	Universitas Pandanaran	V	X	X
32	Universitas Tunas Pembangunan	V	X	X
33	Universitas Muhadi Setiabudi	V	X	X
34	Universitas Sahid Surakarta	V	V	X
35	Universitas Islam Batik	V	V	X
36	Universitas Widya Dharma	V	V	X
37	Universitas NU Surakarta	V	X	X
38	Universitas Boyolali	V	X	X
39	Universitas Sultan Fatah	V	X	X
40	Universitas Peradaban Bumiayu	V	X	X
41	LLDIKTI Wilayah IV	V	V	V
42	BPKP Wilayah Jawa Tengah	V	V	V
43	BAPPEDA Wilayah Jawa Tengah	V	V	V
44	PW Muhammadiyah Jawa Tengah	V	V	V

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2024.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, populasi dan sampel dalam penelitian ini diuraikan dalam tabel 3.2, Penentuan populasi dan sampel ini bertujuan untuk memastikan representativitas dan validitas hasil penelitian.

Tabel 3.2
Populasi dan Sampel

	Kriteria	Jumlah
Populasi:	Top 40 perguruan tinggi & 4 lembaga di Jawa Tengah	44
Sampel:	Tidak menyediakan informasi publik	2
	Belum terdapat badan pengawas internal independen	15
	Belum melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara berkala	8
Total		19

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2024.

Melihat hal tersebut, sesuai dengan konsep *Good Public Governance* (*GPG*) yang melibatkan tiga pilar utama: negara, lembaga negara, dan masyarakat (Hoesada, 2013). Penelitian ini menargetkan *stakeholder* mengenai pemahaman mendalam tentang topik penelitian. Mahasiswa berperan sebagai pengguna langsung layanan, lembaga pemerintah terlibat dalam pengawasan, regulasi, dan dukungan terhadap kegiatan, serta pimpinan wilayah Muhammadiyah juga turut serta dalam mengawasi dan mendukung perguruan tinggi yang terafiliasi dengan Muhammadiyah, serta memastikan bahwa nilai-nilai organisasi dan standar kualitas pendidikan terjaga dengan baik.

Jumlah responden ditentukan sebagai berikut: 105 mahasiswa dari 15 perguruan tinggi (masing-masing 7 mahasiswa), 15 responden dari 3 lembaga pemerintah (masing-masing 5 orang), dan 5 responden dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, sehingga total responden berjumlah 125 orang. Memperbanyak jumlah mahasiswa sebagai responden mencerminkan bahwa mereka adalah pihak yang paling langsung merasakan dampak dari kebijakan dan praktik pengelolaan perguruan tinggi (Aprilia, 2017). Menurut Permendikbud No. 7 Tahun 2020, lembaga pemerintah bertanggung jawab dalam pengawasan hasil pemantauan dan evaluasi untuk dugaan pelanggaran pengelolaan perguruan tinggi, yang mencakup bagian umum, bagian akademik, dan bagian kelembagaan. Sementara itu, pimpinan wilayah Muhammadiyah memastikan perguruan tinggi yang terafiliasi tetap menjaga nilai-nilai organisasi dan standar kualitas pendidikan, mencakup bidang pendidikan, bidang kaderisasi, serta bidang keorganisasian.

3.4 Pengembangan Instrumen

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, menurut Sugiyono (2013), “Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial, yang secara spesifik dikenal sebagai variabel” (p. 102). Instrumen ini digunakan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat, sehingga setiap instrumen harus mempunyai skala. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang didistribusikan kepada mahasiswa di 15 perguruan tinggi di Jawa Tengah, 3 lembaga pemerintah di Jawa Tengah, dan 1 pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jawa tengah. Kuesioner tersebut disusun secara terstruktur dan sistematis untuk diisi oleh responden.

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengandung pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, alokasi dana, dan *Good Public Governanccce (GPG)*. Menurut Sugiyono (2013), “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” (p. 38). Dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya:

A. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Good Public Governance (GPG)* Perguruan Tinggi. Menurut Aprilia (2017), variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi

akibat karena adanya variabel independen. Dalam konteks ini, *GPG* diidentifikasi sebagai variabel dependen (Y).

a) Definisi Konseptual

Good Public Governance (GPG) pada dasarnya mengatur pola hubungan antara penyelenggara negara dan masyarakat, antara penyelenggara negara dan lembaga negara, serta antar lembaga negara dengan memfokuskan *GPG* pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu negara, lembaga negara, dan masyarakat (Hoesada, 2013). Memperjelas bahwa *GPG* memiliki cakupan yang luas dengan memberikan ruang kepada publik dan berorientasi pada kepentingan umum. Serta penerapan *GPG* di lingkungan perguruan tinggi muncul sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan kepentingan antara *stakeholder (principal)* dengan manajemen perguruan tinggi (*agent*). *GPG* menjadi acuan bagi lembaga-lembaga negara untuk mendorong efektivitas dan menjadi standar minimal bagi semua lembaga negara serta jajarannya.

b) Definisi Operasional

Penelitian Setiabudi (2015) mengidentifikasikan asas-asas *Good Public Governance (GPG)* yang digunakan dalam penilaian organisasi, diantaranya:

1. Partisipasi
2. Keadilan
3. Akuntabilitas
4. Transparansi
5. Efektivitas
6. Efisiensi

B. Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana. Menurut Aprilia (2017), variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Dalam konteks ini, pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana diidentifikasi sebagai variabel independen (X).

I. Pelayanan Akademik

a) Definisi Konseptual

Pelayanan Akademik (PA) pada dasarnya mencerminkan kemampuan organisasi atau institusi dalam mencetak lulusan yang kompeten, beretika, dan siap bersaing di pasar global. Banyaknya lulusan yang memenuhi standar kebutuhan industri dapat mempercepat penyebaran reputasi perguruan tinggi dalam tata kelolanya secara otomatis (Susetyo *et al.*, 2022). Hal ini memperjelas bahwa PA terlibat dalam keunggulan pengelolaan perguruan tinggi dalam mencetak lulusan kompeten dan mampu bersaing dipasar global. Dalam konteks *GPG*, PA menunjukkan bagaimana perguruan tinggi mampu mengelola dan memberikan pendidikan yang berkualitas, yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. PA menjadi bagian penting dalam menunjukkan bagaimana lembaga tersebut memprioritaskan kualitas akademik sebagai prioritas utama.

b) Definisi Operasional

Menurut Anisah *et al.* (2020), tolak ukur pelayanan akademik mencakup *tangible* (bukti fisik), *reliability* (keandalan), *responsiveness* (daya tanggap), *assurance* (jaminan), dan *empathy* (perhatian individu). Namun, dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 2023, standar akademik mencakup kompetensi lulusan atau capaian akhir yang melibatkan *stakeholder*, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Selain itu, pelayanan difokuskan pada fasilitasi pengembangan dan implementasi pelayanan akademik itu sendiri, yang mencakup:

1. Program Beasiswa
2. Sertifikasi Kompetensi
3. Kolaboratif Eksternal
4. Integrasi Nasional

II. Kepatuhan Regulasi

a) Definisi Konseptual

Kepatuhan Regulasi (KR) pada dasarnya mencerminkan kemampuan organisasi atau institusi dalam memastikan penerapan hukum dan kebijakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan mematuhi regulasi, perguruan tinggi menjamin bahwa semua kegiatan dan kebijakan institusi mengikuti hukum dan standar yang berlaku (Hakim, 2016). Hal ini memperjelas bahwa KR terlibat dalam komitmen pengelolaan perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan, hukum, dan prosedur yang sesuai. Dalam konteks *GPG*), KR menunjukkan bagaimana perguruan tinggi mampu berkomitmen

untuk mengelola dan beroperasi sesuai standar yang berlaku, yang berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kode etik. KR menjadi bagian penting dalam menunjukkan bagaimana lembaga tersebut memprioritaskan komitmen akademik sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan.

b) Definisi Operasional

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 4 tahun 2014, tolak ukur dalam kepatuhan regulasi mencakup otonomi dan pola pengelolaan perguruan tinggi. Namun, dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, adanya pemberian otonomi kepada perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan dan program. Meskipun demikian, kasus suap yang menimpa mantan Rektor UNUD dan UNILA menunjukkan pelanggaran terhadap otonomi. Kepatuhan difokuskan pada sejauh mana perguruan tinggi mematuhi regulasi, yang mencakup:

1. Kepatuhan Otonomi Akademik
2. Kepatuhan Otonomi Kemahasiswaan
3. Kepatuhan Otonomi Keorganisasian

III. Alokasi Dana

a) Definisi Konseptual

Alokasi Dana (AD) pada dasarnya mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghindari penyalahgunaan penyaluran sumber daya publik. AD yang sesuai membantu menghindari pemborosan sumber daya publik, menetapkan prioritas strategis, serta

mengurangi potensi korupsi (Damarik *et al.*, 2023). Hal ini memperjelas bahwa AD terlibat dalam mengoptimalkan pengelolaan perguruan tinggi dalam penggunaan sumber daya publik secara tepat sasaran. Dalam *GPG*, AD menunjukkan bagaimana perguruan tinggi mampu membuat keputusan tentang inisiatif mana yang akan diberikan dana berdasarkan prioritas strategis. AD menjadi bagian penting dalam menunjukkan bagaimana lembaga tersebut memprioritaskan profesionalisme dalam pengelolaan sumber daya publik.

b) Definisi Operasional

Menurut Suroso *et al.* (2020), tolak ukur dalam alokasi dana mencakup perencanaan anggaran dan pengadaan barang. Namun, dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, penekanan diberikan pada pelimpahan biaya akreditasi, dan fokus pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, Ditjen Diktiristek menerbitkan buku pedoman keuangan pendanaan 2024, sebagai upaya untuk mengalokasikan dana secara optimal (Ditjen Diktiristek, 2024). Alokasi dana ini difokuskan pada sumber daya publik, yang mencakup:

1. Penyaluran Dana Penelitian
2. Penyaluran Dana Kemahasiswaan

Tabel 3.3
Kisi-Kisi Instrumental

No	Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan	Skala
1	Pelayanan Akademik	Anisah, Bambang Santoso Haryono, dan Lely Indah Mindarti (2020), dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.	<p>a. Program Beasiswa</p> <p>b. Sertifikasi Kompetensi</p> <p>c. Kolaboratif Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi menyediakan informasi terperinci mengenai program beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa. 2. Program beasiswa selalu mencakup berbagai kebutuhan akademik maupun non-akademik mahasiswa. 3. Perguruan tinggi menyediakan alur program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang membutuhkan. 4. Program beasiswa perguruan tinggi melibatkan pihak ketiga, seperti pemerintah, swasta, dan yayasan. 5. Perguruan tinggi mengadakan seminar dan <i>workshop</i> untuk membantu mahasiswa memahami persyaratan beasiswa. 6. Perguruan tinggi menyediakan informasi terkait sertifikasi kompetensi yang dapat diikuti oleh mahasiswa dan dosen. 7. Proses sertifikasi kompetensi di perguruan tinggi selalu mencakup berbagai bidang keilmuan. 8. Perguruan tinggi memberikan akses untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional atau internasional. 9. Sertifikasi kompetensi yang ditawarkan perguruan tinggi relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 10. Perguruan tinggi bekerjasama dengan industri atau lembaga terkait dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi. 11. Perguruan tinggi menyediakan akses informasi mengenai bentuk kerjasama yang dimiliki. 12. Terdapat kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam pengembangan akademik maupun non-akademik mahasiswa. 13. Perguruan tinggi memiliki kemitraan dengan dunia usaha untuk menyelenggarakan kuliah tamu atau kunjungan industri. 	Likert

No	Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan	Skala
			d. Integrasi Nasional	<p>14. Bentuk kerjasama perguruan tinggi selalu mencakup aspek mutu, riset, teknologi.</p> <p>15. Perguruan tinggi menyediakan alur kerjasama yang dapat diikuti mahasiswa dan dosen dalam pengembangan karir.</p> <p>16. Perguruan tinggi menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai ajang nasional yang dapat diikuti.</p> <p>17. Kegiatan, program kerja, dan kurikulum di perguruan tinggi selalu relevan dengan kebutuhan dan standar nasional.</p> <p>18. Perguruan tinggi memiliki komitmen untuk selalu mengikuti dan menerapkan relevansi akademik nasional.</p> <p>19. Terdapat pengenalan, pelatihan, dan seleksi sebelum keikutsertaan dalam kegiatan nasional oleh mahasiswa.</p> <p>20. Perguruan tinggi mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan nasional melalui program kerja yang ditetapkan.</p>	
2	Kepatuhan Regulasi	PP RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.	<p>a. Kepatuhan Otonomi Akademik</p> <p>b. Kepatuhan Otonomi Kemahasiswaan</p>	<p>1. Standar akademik yang diterapkan perguruan tinggi selalu relevan mengikuti perkembangan standar nasional.</p> <p>2. Perguruan tinggi menaati dan mematuhi regulasi nasional dalam penyusunan kurikulum dan metode pengajaran.</p> <p>3. Kepatuhan untuk menjalankan Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 mengenai kebebasan belajar dengan kurikulum merdeka.</p> <p>4. Perguruan tinggi menjalankan program nasional, seperti magang merdeka, dan pertukaran mahasiswa.</p> <p>5. Standar kemahasiswaan yang diterapkan perguruan tinggi selalu sesuai dengan ketetapan standar nasional.</p> <p>6. Perguruan tinggi menjalankan prosedur penerimaan dan dukungan mahasiswa sesuai regulasi yang berlaku.</p> <p>7. Kepatuhan untuk menjalankan PP No.4 Tahun 2014 mengenai kegiatan pembinaan, organisasi, dan ekstrakurikuler mahasiswa.</p>	Likert

No	Variabel	Sumber	Indikator	Pernyataan	Skala
				9. Perguruan tinggi bertanggung jawab dalam penggunaan dana yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.	
	d. Transparansi			10. Perguruan tinggi berkomunikasi terbuka tentang kurikulum, fasilitas, dan prosedur akademik yang mudah diakses. 11. Perguruan tinggi transparan dalam pelaporan dan penerapan <i>rules</i> untuk memastikan semua pihak memahami standar yang berlaku. 12. Perguruan tinggi terbuka dalam alokasi dan penggunaan dana dengan laporan yang jelas dan diakses oleh <i>stakeholder</i> .	
	e. Efektivitas			13. Perguruan tinggi menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, termasuk akses ke program beasiswa dan fasilitas. 14. Perguruan tinggi mematuhi semua regulasi yang berlaku secara efektif dan konsisten. 15. Perguruan tinggi mendukung proyek dengan dampak signifikan terhadap pengembangan institusi.	
	f. Efisien			16. Perguruan tinggi mengelola sumber daya secara efisien untuk layanan pendidikan yang berkualitas. 17. Perguruan tinggi mematuhi standar dengan biaya efektif dan menggunakan prosedur administratif yang efisien. 18. Perguruan tinggi menggunakan dana secara maksimal untuk mendukung inisiatif yang berdampak tinggi.	

Sumber: Data diolah oleh penulis, Tahun 2024.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik survei, Sugiyono (2013) mengatakan bahwa “Metode *survey* digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (p. 6). Oleh karena itu, penelitian ini melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner langsung ke 15 perguruan tinggi di Jawa Tengah, yang melibatkan Mahasiswa, badan pemerintah dari LLDIKTI Wilayah VI, BPKP, BAPPEDA, serta satu PW Muhammadiyah Jawa Tengah, diantaranya:

- 1) Universitas Diponegoro (UNDIP)
- 2) Universitas Sebelas Maret (UNS)
- 3) Universitas Negeri Semarang (UNNES)
- 4) Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)
- 5) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
- 6) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
- 7) Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN Walisongo)
- 8) Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)
- 9) Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPWR)
- 10) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS)
- 11) Universitas Tidar (UNTIDAR)
- 12) Institute Seni Islam Surakarta (ISI Surakarta)
- 13) Universitas Islam Negeri Salatiga (UIN Salatiga)
- 14) Universitas Muhammadiyah Magelang (UNIMMA)

15) Universitas Sains dan Teknologi Komputer (STEKOM)

Dalam penelitian kuantitatif ini, peneliti dan subjek penelitian bersifat independen, sehingga memungkinkan pengumpulan data objektif menggunakan kuesioner. Menurut Sugiyono (2013), “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” (p. 142). Teknik kuesioner ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini mengingat jumlah responden tersebar di wilayah yang luas.

Dalam penyusunan kuesioner, peneliti menggunakan skala Likert sebagai skala pengukuran. Menurut Sugiyono (2013), skala Likert memungkinkan variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menyusun pernyataan atau pertanyaan. Skala ini mengharuskan adanya gradiasi respon yang berkisar dari sangat positif sampai sangat negatif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sistem berjenjang 1 (satu) sampai 5 (lima) yang mencakup:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, kuesioner digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Indikator-indikator dalam kuesioner ini diadaptasi dari penelitian terdahulu dan telah dimodifikasi oleh peneliti untuk menyesuaikan

dengan variabel-variabel yang diteliti. Modifikasi ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan relevansi data yang diperoleh dengan tujuan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup metode statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh distribusi respon jawaban responden melalui ukuran mean, standar deviasi, maksimum, minimum, dan median. Hal ini dimaksudkan untuk memahami karakteristik dasar dari data yang dikumpulkan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, analisis statistik inferensial menurut Sugiyono (2013), adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis sampel dengan hasil yang dapat diterapkan pada populasi secara umum. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui *software* SmartPLS 4.0, yang menurut Wong (2013), merupakan pendekatan pemodelan jalur dan teknik analisis multivariat untuk menguji hubungan linear dan aditif berdasarkan dukungan teoretis.

Menurut Hair *et al.* (2022), model statistik Structural Equation Modeling (SEM) digunakan untuk menguji model statistik yang dapat menghasilkan pola sebab dan akibat. Model statistik SEM merupakan model hibrida yang meliputi perspektif prediktif dari beberapa analisis, termasuk analisis jalur dan analisis faktor. Model ini sangat efektif dalam menangani masalah khusus yang mungkin timbul dalam analisis statistik multivariat, karena memungkinkan prediksi antar variabel secara simultan. Analisis Partial Least Squares

Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dapat bekerja dengan data yang tidak berdistribusi normal, karena PLS-SEM termasuk kelompok statistik non-parametrik.

PLS-SEM dapat digunakan dengan model yang kompleks bahkan dengan sampel penelitian yang terbatas. Menurut Hair *et al.* (2022), dalam analisis PLS-SEM terdapat dua tahap evaluasi: evaluasi model pengukuran (*evaluation of measurement model*) dan evaluasi model struktural (*evaluation of structural model*). Evaluasi model pengukuran digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas, sedangkan evaluasi model struktural digunakan untuk menguji kausalitas. Dalam evaluasi model pengukuran, terdapat pengukuran reflektif dan formatif.

Variabel independen dalam penelitian ini diukur secara reflektif, dengan indikator yang merupakan manifestasi dari konstruk laten dan arah kausalitas dari konstruk ke indikator. Indikator dalam pelayanan akademik, kepatuhan regulasi, dan alokasi dana mencerminkan kualitas, kepatuhan, dan penyaluran dari konstruk laten. Sedangkan variabel dependen diukur secara formatif, di mana indikator membentuk atau menyebabkan konstruk laten dengan arah kausalitas dari indikator ke konstruk. Indikator dalam *Good Public Governance (GPG)* Perguruan Tinggi membentuk konsep *GPG* secara keseluruhan. Ukuran kecocokan dalam PLS-SEM berbasis varian ini fokus pada perbedaan antara nilai variabel yang diperkirakan dengan nilai prediksi oleh model tersebut. Hal ini penting untuk memastikan model yang digunakan dapat merepresentasikan hubungan antar variabel yang diteliti.

A. *Evaluation of Measurement Model (Outer Model)*

Evaluation of measurement model merujuk pada proses penilaian validitas dan reliabilitas dari sejumlah pengukuran atau skala yang digunakan dalam penelitian. Menurut Hair *et al.* (2022), model pengukuran ini berfungsi untuk melihat tiap-tiap indikator yang memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Wong (2013), *outer model* ini digunakan untuk evaluasi validitas dan reliabilitas dari variabel indikator yang digunakan dalam model pengukuran. Pada penelitian ini, digunakan *evaluation of reflective measurement models* untuk mengukur variabel independen dan *evaluation of reflective formative measurement models* untuk mengukur variabel dependen, dengan referensi langsung dari Hair *et al.* (2022), diantaranya:

a) *Evaluation of Reflective Measurement Models*

I. *Indicator Reliability*

Indicator reliability merupakan ukuran seberapa baik setiap indikator merefleksikan konstruk laten yang diukur. *Indicator reliability* dinilai melalui nilai *outer loadings*. Nilai *outer loading* yang valid adalah $\geq 0,70$, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut reliabel dan secara signifikan mencerminkan konstruk laten. Jika nilai *outer loading* berada di antara 0,40 dan 0,70, indikator tersebut harus dipertimbangkan untuk penghapusan guna meningkatkan Average Variance Extracted (AVE). Namun, jika nilai *outer loading* $\leq 0,40$, indikator tersebut harus dihapus dari model karena kontribusinya sangat rendah.

II. *Internal Consistency (Cronbach's Alpha, Composite Reliability, Reliability Coefficient)*

Internal consistency digunakan untuk menguji reliabilitas dan untuk membuktikan ketepatan dalam pengukuran seluruh konstruk dalam sebuah model. Ini melibatkan penilaian terhadap keandalan internal dari konstruk tersebut. *cronbach's alpha* digunakan sebagai batas bawah dan *composite reliability* sebagai batas atas untuk *reliability coefficient*, yang umumnya harus lebih tinggi dari 0,70. Dalam penelitian eksplorasi, nilai antara 0,60 dan 0,70 dianggap dapat diterima. Namun, nilai keandalan yang lebih tinggi dari 0,95 tidak diinginkan karena dapat menunjukkan redundansi indikator atau *overfitting*.

III. *Convergent Validity (Average Variance Extracted)*

Convergent validity mengacu pada tingkat kesesuaian atau konsistensi antara pengukuran dari variabel yang seharusnya saling terkait. Untuk mengevaluasi *convergent validity*, digunakan Average Variance Extracted (AVE), yang harus lebih besar dari 0,5. $AVE > 0,5$ menunjukkan bahwa lebih dari setengah varians dari indikator dijelaskan oleh konstruk yang diukur, sehingga menunjukkan validitas konvergen yang baik.

IV. *Discriminant Validity (Fornell and Larcker Criterion, HTMT)*

Discriminant validity adalah ukuran sejauh mana suatu konstruk berbeda dari konstruk lainnya berdasarkan standar empiris. Ini menunjukkan bahwa konstruk yang diukur benar-benar

merepresentasikan konsep yang unik dan berbeda. Untuk menetapkan *discriminant validity*, sebuah konstruk harus mampu membedakan dirinya sendiri dan harus bisa menangkap fenomena yang tidak direpresentasikan oleh konstruk lain dalam suatu model penelitian.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan Heterotrait-Monotrait Criterion (HTMT) untuk mengevaluasi *discriminant validity* dalam PLS-SEM. Nilai ambang batas yang diasumsikan adalah 0,90 untuk konstruksi yang serupa secara konseptual dan 0,85 untuk konstruksi yang berbeda secara konseptual. Peneliti juga menggunakan *bootstrap confidence intervals* untuk menilai apakah nilai HTMT berbeda dari ambang batas tertentu (misalnya, 0,90) untuk semua kombinasi konstruk.

b) *Evaluation of Formative Measurement Models*

I. *Indicator Collinearity*

Collinearity of indicators mengacu pada tingkat korelasi antara indikator-indikator dalam konstruk. Untuk mengukur ini, digunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Idealnya, nilai VIF setiap indikator harus lebih rendah dari 3, tetapi harus di bawah 5. Jika nilai VIF melebihi 5, peneliti perlu mempertimbangkan untuk menghilangkan indikator tersebut, menggabungkan indikator ke dalam indeks tunggal, atau membuat konstruk tingkat tinggi untuk mengatasi masalah multikolinearitas antar indikator penelitian yang akan dilakukan..

II. *Significance and Relevance of Indicator Weight*

Dalam *significance and relevance of Indicator Weight* mengacu pada penilaian pentingnya indikator dalam model menggunakan *outer weight (relative importance)* dan *outer loading (absolute importance)*, serta menggunakan *bootstrapping* untuk menilai signifikansinya. Ketika *weight* (bobot) indikator signifikan, ada dukungan empiris untuk mempertahankan indikator tersebut. Namun, jika *weight* (bobot) tidak signifikan tetapi *outer loading*-nya relatif tinggi (yaitu, $\geq 0,50$) atau signifikan secara statistik, indikator umumnya tetap harus dipertahankan. Sebaliknya, jika *outer weight* tidak signifikan dan *outer loading* relatif rendah (yaitu, $< 0,50$), peneliti harus mempertimbangkan untuk menghapus indikator.

B. *Evaluation of Structural Model (Inner Model)*

Evaluation of structural model merujuk pada pengujian kausalitas diantara konstruk variabel. Menurut Hair *et al.* (2022), model ini digunakan untuk mengevaluasi kecocokan model struktural dengan data empiris. Seperti yang disampaikan Wong (2013) *Inner model* merupakan bagian dari model yang memperkirakan hubungan antara variabel laten (konstruk) yang mendasari data observasional (indikator). Dengan referensi langsung dari Hair *et al.* (2022), pengujian ini diantaranya:

a) Uji Multikolinier

Uji Multikolinier digunakan untuk memeriksa *collinearity* di antara prediktor dalam model struktural dengan menggunakan *inner* Variance Inflation Factor (VIF). Nilai VIF prediktor harus kurang dari 5 dan

sebaiknya lebih rendah dari 3 untuk menghindari masalah kolinearitas yang kritis. Jika VIF melebihi nilai tersebut, pertimbangkan untuk menghilangkan konstruk, menggabungkan prediktor ke dalam satu konstruk, atau membuat konstruk dengan orde yang lebih tinggi untuk mengatasi masalah kolinearitas.

b) *Path Coefficients*

Path coefficients adalah koefisien yang mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel dalam model struktural. *Path coefficients* digunakan untuk mengevaluasi arah hubungan hipotesis dalam model dengan menggunakan *bootstrapping* dalam PLS-SEM. Jika $p\text{-value} < 0,05$, hasilnya dianggap signifikan dan metode percentile digunakan untuk membangun *confidence intervals* dari data yang berdistribusi normal. Namun, ketika distribusi estimasi parameter *bootstrap* (misalnya, *path coefficient*) sangat miring, yang ditunjukkan oleh nilai skewness di luar rentang -2 dan $+2$, metode Bias-corrected and Accelerated (BCa) dapat digunakan untuk menghasilkan *confidence intervals* yang lebih akurat.

c) Uji R^2

Uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa baik model struktural dapat menjelaskan variasi dalam variabel endogen. R^2 adalah koefisien determinasi yang umum digunakan untuk evaluasi *inner* model. R^2 mewakili model *predictive power* yang dihitung sebagai korelasi kuadrat antara nilai aktual dan prediksi konstruk pada endogen tertentu. Ini mencerminkan efek gabungan variabel laten eksogen pada variabel

laten endogen terkait. Menurut Hair *et al.* (2022), tidak lagi menyebutkan secara spesifik terkait nilai *R-square* seperti, 0,25 rendah, 0,50 sedang, dan 0,75 tinggi. Karena *R-square* adalah fungsi dari banyaknya variabel prediktor.

d) Uji F^2

F^2 adalah ukuran efek yang digunakan untuk menilai sejauh mana variabel laten eksogen mempengaruhi variabel laten endogen dalam model struktural. F^2 dihitung dengan membandingkan R^2 model dengan dan tanpa konstruk tertentu. Nilai F^2 membantu dalam mengevaluasi dampak relatif dari prediktor individual dalam model. Nilai F^2 diinterpretasikan sebagai berikut: 0,02 menunjukkan efek kecil, 0,15 menunjukkan efek sedang, dan 0,35 menunjukkan efek besar dari konstruk prediktor terhadap konstruk endogen.

e) Daya Prediksi Model

Daya prediksi model yang menilai secara keseluruhan pengukuran mencakup, $PLS_{predict}$, $Q^2_{predict}$, dan Cross-Validated Predictive Ability Test (CV PAT). Dimana $PLS_{predict}$ digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model PLS-SEM. $PLS_{predict}$ menghasilkan prediksi nilai untuk indikator dalam data *holdout* atau *cross-validation* dan membandingkannya dengan nilai aktual untuk menilai akurasi prediksi model. $Q^2_{predict}$ digunakan untuk menilai daya prediksi jalur dari model. Nilai $Q^2_{predict}$ dihitung dengan teknik *blindfolding* dan menunjukkan seberapa baik data observasi dapat direkonstruksi dengan model yang sudah dipasang. Nilai $Q^2_{predict}$ yang positif menunjukkan

daya prediksi yang baik. Serta CV PAT digunakan untuk mengevaluasi kemampuan prediktif model dengan menggunakan *cross-validation*. Ini melibatkan membagi data menjadi beberapa subset, melatih model pada subset tertentu, dan menguji model pada subset yang tersisa. Hasil dari CV PAT memberikan gambaran tentang seberapa baik model dapat memprediksi data yang belum dilihat sebelumnya.

f) SRMR

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) digunakan mengevaluasi seberapa baik model yang diestimasi sesuai dengan data yang diamati dalam konteks PLS-SEM. SRMR mengukur perbedaan antara matriks korelasi yang diobservasi dan matriks korelasi yang diprediksi oleh model. Semakin rendah nilai SRMR, semakin baik model dapat menjelaskan hubungan antar variabel secara keseluruhan berdasarkan data yang ada, menunjukkan tingkat kesesuaian yang lebih baik antara model yang diusulkan.